



## MASALAH DALAM KERJA SAMA MILITER INDONESIA-AUSTRALIA

Poltak Partogi Nainggolan\*)

### Abstrak

*Kasus pelecehan terhadap Pancasila dan TNI telah berimplikasi pada dihentikannya secara sepihak kerja sama militer Indonesia-Australia. Sikap ini memperoleh tanggapan luas pro dan kontra di tanah air, selain perbedaan pendapat di pemerintahan dan parlemen. Selain respons yang keras di kalangan yang melihat hal ini sebagai pelecehan, muncul tanggapan yang mengingatkan untuk bersikap hati-hati. Perkembangan lingkungan strategis dan tantangan serta ancaman di kawasan dan tingkat global mengingatkan TNI dan Indonesia agar mengambil keputusan yang tepat dalam mengevaluasi hubungan bilateralnya dengan Australia.*

### Pendahuluan

Pada 4 Januari 2017 Panglima TNI mengumumkan penghentian kerja sama militer Indonesia-Australia, antara TNI dan *Australian Defence Force* (ADF) yang kemudian memperoleh perhatian luas. Kerja sama dalam bentuk pelatihan Bahasa Indonesia ini sendiri sebenarnya telah dihentikan secara sepihak oleh TNI sejak 18 Desember 2016. Pangkal masalah adalah ditemukannya materi ajaran yang melecehkan sejarah dan ideologi Indonesia, yang dinilai telah dibuat secara sengaja dan dibiarkan terjadi oleh institusi dan aparat militer di sana. Ditemukan juga pembuatan materi sejarah yang tidak benar tentang peran Sarwo Edhie Wibowo, mantan Komandan Komando Pasukan Khusus (Kopassus-dulu RPKAD/Resimen

Para Komando Angkatan Darat) dalam menghadapi kudeta G-30-S PKI. Materi ajar di institusi militer Australia yang ditemukan oleh perwira Kopassus yang mengajar di sana menyudutkan peran Indonesia, terutama TNI, yang buruk di Papua dan Timor-Timur. Selain itu, ditemukan pelecehan terhadap Pancasila, yang dilecehkan menjadi "Pancasila." Hal terakhir ini dibiarkan terjadi di Australia, di sebuah institusi pendidikan modern milik militer.

Seperti dalam masalah nasional dan internasional lainnya, masalah dalam kerja sama militer Indonesia-Australia yang tercoreng ini melahirkan sikap yang berbeda, pro dan kontra, sekali pun untuk kasus ini tidak terlalu ekstrim. Tulisan ini menganalisis mengapa kedua sikap itu

\*) *Research Professor* Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Bidang Hubungan Internasional, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Email: pptogin@yahoo.com



muncul dan mengaitkannya dengan sejarah hubungan bilateral Indonesia-Australia serta persoalan yang muncul selama ini.

### **Perspektif Respons yang Keras**

Secara realistis dapat dikatakan muncul pendapat yang dominan yang kemudian mendukung keputusan keras dan cepat yang diambil oleh TNI, terutama dari kalangan parlemen, Anggota Komisi I dan Pimpinan DPR RI, di samping internal TNI sendiri, terutama Panglima TNI, Jend. Gatot Nurmantyo. Dapat dimaklumi bahwa berbagai bentuk pelecehan tersebut di atas, termasuk penulisan sejarah yang tidak proporsional yang sangat menyudutkan Indonesia, tidak hanya tidak dapat diterima oleh perwira Kopassus yang bertugas menjadi instruktur yang memberi pelatihan penerjemahan Bahasa Indonesia di sana, tetapi juga masyarakat Indonesia yang terpelajar sekali pun. Hal ini disebabkan masalah Papua adalah urusan domestik Indonesia, bukan Australia, dan merupakan materi kerja sama yang telah disepakati pemimpin kedua negara, khususnya Menteri Pertahanan (Menhan) dan Panglima Angkatan Bersenjata masing-masing.

Dengan demikian, sikap Australia tidak perlu melebar, mengaitkan pembelajaran dan pelatihan bahasa dengan hal-hal yang tidak relevan dan merupakan urusan domestik negara tetangganya, Indonesia, yang telah dipilih menjadi mitra kerja sama militernya. Sementara pembiaran terhadap sikap institusi militer Australia tersebut merefleksikan pandangan resmi politik pemerintah dan negaranya yang negatif terhadap kebijakan Indonesia di wilayahnya sendiri. Dalam konteks hubungan negara yang formal di dunia internasional, hal ini tidak boleh terjadi. Apalagi dalam jangka panjang, setelah situasi politik dan keamanan di Indonesia akhir-akhir ini dalam kondisi terkendali, tanpa penerapan Daerah Operasi Militer (DOM) seperti pada masa Orde Baru, sementara pemilu legislatif dan kepala daerah yang bebas pun berjalan secara damai. Dengan demikian, menjadi sangat ganjil melihat sikap Pemerintah Australia yang tidak semakin dewasa dalam menjalankan hubungan bilateral dengan tetangga dekatnya yang sudah memiliki hubungan secara formal sejak lama.

Dalam menilai kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) Indonesia, perlu juga dipahami oleh Pemerintah dan rakyat Australia secara luas bahwa invasi Indonesia ke Timor Timur pada masa lalu juga dilakukan atas 'restu' Pemerintah Australia di bawah PM Gough Whitlam. Mereka tidak perlu seperti tanpa dosa dengan tiba-tiba menyudutkan Indonesia sebagai pihak yang sepihak harus dituding atas 'kesalahan sejarah' itu. Belum lama publik di Indonesia juga dikejutkan dengan terkuaknya aktivitas intelijen Australia yang mengintersepsi pembicaraan pemimpin Indonesia, tidak hanya dalam peristiwa menjelang referendum di Timor Timur, tetapi juga percakapan pribadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Belum lagi insiden pencemaran di perairan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang kaya ikan dan sumber daya alam (SDA) laut lainnya oleh perusahaan pertambangan minyak Australia, Montara, yang telah merusak kehidupan nelayan di sana dan sangat merugikan lingkungan dan SDA Indonesia yang tidak pernah mereka pedulikan.

Sementara rakyat Indonesia di perbatasan perairan NTT dengan Australia tidak luput dari tindakan pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh polisi Australia. Kasus pembakaran dan penenggelaman kapal nelayan WNI yang dituding membawa masuk imigran ilegal, namun aparat pengadilan Australia telah memenangkan gugatan yang diajukan nelayan kita, adalah kasus lain yang menunjukkan arogansi dan kesewenang-wenangan aparat Pemerintah Australia pada masa lalu terhadap warga Indonesia. Kondisi ini diperburuk oleh kejadian terkini yakni kasus lompat pagar separatis Papua ke Konsulat Jenderal RI di Melbourne pada 6 Januari 2017, yang seperti dibiarkan oleh aparat keamanan Australia, padahal dalam hukum internasional mereka memiliki tanggung jawab untuk mencegahnya.

### **Perspektif Respons yang Hati-hati**

Perspektif kedua yang berseberangan secara diametral adalah pandangan yang hati-hati, berusaha dengan bijak memahami persoalan yang muncul tanpa mengurangi ketegasan yang ditunjukkan. Pandangan ini berpendapat upaya evaluasi kerja sama militer TNI-ADF boleh dilakukan atau jika

diperlukan penghentian sementara, tidak mengabaikan asas kehati-hatian, sehingga respons tegas harus proporsional, tidak membabi-butakan dan memperlihatkan sikap patah arang, namun tetap menghormati kelaziman dalam diplomasi dan hukum internasional. Hal ini disebabkan perjanjian kerja sama militer yang telah disepakati antara kedua Menhan tidak mudah dibatalkan begitu saja, mengingat ada klausul atas pelanggaran kesepakatan yang terjadi. Dengan demikian, jika dipaksakan dengan sanksi sepihak dapat merusak sekaligus merugikan hubungan bilateral di bidang-bidang lainnya.

Oleh karena itu, insiden di Sekolah Bahasa di Australia tersebut tidak boleh terulang, tetapi kerja sama militer boleh berlanjut dengan upaya koreksi. Sebagai langkah alternatif, kedua negara dapat mengeksplorasi hal-hal lain yang bermanfaat bagi kemajuan kedua negara dan bangsa. Pandangan seperti ini ditampilkan oleh Presiden Jokowi, Wakil Presiden Yusuf Kalla, dan Menhan Ryamizad Ryacudu, serta pakar hubungan internasional seperti Aleksius Jemadu dari Universitas Pelita Harapan. Mereka mengingatkan bahwa Menhan Australia, Marise Payne, telah meminta maaf secara terbuka kepada Pemerintah dan rakyat Indonesia atas insiden yang terjadi melalui surat yang dikirimkan kepada mitranya Menhan Ryacudu pada 5 Januari 2017, sehari setelah insiden tersebut mengemuka ke publik.

Dengan penyampaian permintaan maaf secara terbuka itu, Kalla mengharapkan permasalahan ini tidak diperpanjang. Respons lain yang hati-hati seperti dari peneliti LIPI, Syamsuddin Haris yang mengingatkan mengapa kita begitu emosional menanggapi Australia, sedangkan terhadap para pelaku pelecehan Pancasila di dalam negeri dibiarkan saja. Reaksi keras Panglima TNI seperti diberitakan *Reuters*, telah membuat Presiden Jokowi menegurnya, karena dinilai *out of control*. Sementara, Panglima TNI membantahnya tidak ada teguran itu.

## Problem Mendasar

Pemerintah dan rakyat Indonesia perlu memahami bahwa masyarakat Australia hidup dan dibesarkan dalam sistem liberal, di tengah-tengah realitas yang tidak terlalu

beragam seperti Indonesia, sehingga tidaklah mengherankan jika jurnalis mereka selalu begitu kritis dan tajam dalam menilai apa yang berlangsung di Indonesia, walaupun bisa saja mereka berlebihan dan keliru. Situasi inilah yang perlu dipahami pemerintah dan masyarakat Indonesia sampai sekarang. Itulah sebabnya pada masa lalu pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia selalu memberikan kriteria tertentu dalam menunjuk Dubesnya untuk Australia, yang biasanya mantan jurnalis handal seperti Sabam Siagian.

Dalam sejarah hubungan bilateral kedua negara terdapat luka lama yang belum bisa disembuhkan, seperti tewasnya 3 orang jurnalis Australia dalam Insiden Balibo tahun 1976. Perwira Kopassus, yang kemudian menjadi tokoh di pemerintahan telah menjadi sorotan atas kejadian itu. Selain itu juga pernah terjadi konfrontasi kecil antara prajurit TNI dengan pasukan UNAMET yang mengakibatkan korban di pihak pasukan Australia dalam pemulihan keamanan Timor-Timur pasca-referendum.

## Penutup

Rakyat Indonesia yang belajar sejarah sampai sekarang tentu tidak bisa melupakan begitu saja peran Australia yang berharga dalam mendukung kemerdekaan Indonesia. Bagaimanapun pemimpin dan rakyat kedua negara, secara kritis harus dapat melihat bahwa realitas tantangan dan ancaman yang berkembang di kawasan dan tingkat global membutuhkan peran kedua pemerintah dan negara untuk meresponsnya, demi mewujudkan stabilitas keamanan. Para pemimpin dan rakyat kedua negara harus cerdas menyadari tantangan global terkait perkembangan lingkungan strategis, seperti eskalasi ketegangan yang berlanjut di Laut China Selatan, kebangkitan militer China dan Jepang, dan beragamnya masalah transnasional yang mengancam, terutama dari para aktor nonnegara, seperti imigran ilegal dan aksi terorisme ISIS/IS (*Islamic States in Iraq and Suriah*). Secara rasional harus dapat dilihat bahwa hal-hal yang baik harus terus dipelihara.

Sebagai konsekuensinya, parlemen, terutama Komisi I tidak perlu menyikapi masalah yang terjadi secara emosional. Panglima TNI dan Menlu dapat diundang untuk melakukan *hearing* di DPR RI, agar

masalahnya menjadi jelas. Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI-Parlemen Australia juga dapat mengambil langkah mengaktifkan dialog untuk memperbaiki hubungan yang terganggu ini. Dalam forum tersebut Kedubes Australia dapat diundang agar diperoleh penjelasan yang objektif. Dengan demikian, Pemerintah Indonesia dapat tetap fokus untuk memperjuangkan kepentingan nasional yang lebih luas, termasuk dalam menciptakan kawasan yang lebih maju dan stabil pada masa-masa mendatang.

## Referensi

- “Australia Bantah Rekrut Prajurit Indonesia: Polemik TNI-ADF, DPR Dukung TNI,” *Suara Pembaruan*, 5 Januari 2017.
- “Australia Tambah Aparat Keamanan,” *Republika*, 10 Januari 2017.
- “Demi Harga Diri, Kerja Sama Militer Ditangguhkan,” *Media Indonesia*, 5 Januari 2017.
- “Diberitakan Ditegur Presiden: Jenderal Gatot Dijailin Media Asing,” *Rakyat Merdeka*, 12 Januari 2017.
- Hutton, Jerry and Gerry Mullany. “Indonesia, saying it was insulted, halts military work with Australia,” *The New York Times International*, January 6, 2017.
- “Menhan: Jangan Gegabah, Kerja Sama Militer Indonesia-Australia Tidak Mudah Dibatalkan,” *Kompas*, 5 Januari 2017.
- Mursid, Fauziah dan Fira Nursyabani, “Australia Minta Maaf,” *Republika*, 6 Januari 2017.
- Parlina, Ina and Haeril Halim. “Palace denies Jokowi-Gatot spat over Australia,” *The Jakarta Post*, January 11, 2017.
- “Pasang Surut Indonesia-Australia,” *Kompas*, 8 Januari 2017.